

Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Bekasi Timur Kelurahan Margahayu

Alan Hidayat

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

Email : alan.hidayat@dsn.moestopo.ac.id

ABSTRAK

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial tunai bersyarat kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang ditetapkan sebagai peserta PKH. Sebagai imbalannya KPM diwajibkan memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), yaitu pendidikan dan kesehatan. Program ini, dalam jangka pendek dana bantuan tunai bersyarat ini diharapkan mampu mengurangi beban pengeluaran rumah tangga (dampak konsumsi langsung), dan dalam jangka panjang merupakan investasi generasi masa depan yang lebih baik melalui peningkatan kesehatan dan pendidikan (dampak pengembangan modal manusia). Artinya, PKH diharapkan sebagai program yang mampu memutus rantai kemiskinan antar generasi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, maka teknik pengumpulan data dengan melalui kegiatan studi lapangan seperti observasi, wawancara dan telaah dokumen. Lalu teknis analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan proses datanya mencakup reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian pada aspek pemahaman program telah efektif hal ini didasarkan bahwa para KPM telah paham dan mengerti dengan baik apa saja yang dijelaskan oleh para pendamping tentang PKH sehingga dalam menjalankan komitmen serta kewajibannya dibidang pendidikan dan kesehatan bisa semaksimal mungkin. Sementara pada aspek tepat sasaran telah efektif hal ini didasarkan pada PKH Kota Bekasi telah menggunakan data yang akurat dan valid dalam memberikan bantuan dan memilih masyarakat yang tepat sesuai kriteria untuk menjadi KPM. Dan yang terakhir pada aspek tepat waktu juga telah efektif hal ini berdasarkan proses penyaluran dana PKH sudah baik dan terstruktur serta telah sesuai waktu yang ditentukan kepada KPM.. Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka Program Keluarga Harapan (PKH) diharapkan bisa selalu membaik setiap saatnya karena PKH merupakan program yang mampu mengurangi dan mengentaskan kemiskinan di masyarakat.

Kata Kunci : Efektif, Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Program Keluarga Harapan (PKH).

ABSTRACT

Program Keluarga Harapan (PKH) is a conditional cash transfer program to the Keluarga Penerima Manfaat (KPM) which is designated as PKH participants. In return KPM is required to meet the requirements related to efforts to improve the quality of Human Resources (SDM), namely education and health. This program, in the short run, this conditional cash transfer program is expected to reduce household expenses (direct consumption impact), and in the long run is a better future generation investment through improving health and education (the impact of human capital development). That is, PKH is expected as a program that can break the poverty chain between generations. The research method used is descriptive method with qualitative approach, hence data collecting technique by through field study activity such as observation, interview and document

review. Then technical data analysis is done at the time of data collection takes place and the data process includes data reduction, data presentation and conclusion. The results of research on the aspect of program understanding has been effective it is based that the KPM have understood and understood well what is explained by the companion about PKH so that in carrying out its commitment and obligation in the field of education and health can as much as possible. While on the right aspect of the target has been effective it is based on PKH Kota Bekasi has used accurate and valid data in providing assistance and choosing the right community according to criteria to become KPM. And the last on the timely aspect has also been effective this is based on the process of channeling PKH funds is good and structured and has been in accordance with the time specified to the KPM. Based on the conclusion of the research, the Program Keluarga Harapan (PKH) is expected to improve every time because PKH is a program that can reduce and alleviate poverty in the community.

Keywords : Effective, Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Program Keluarga Harapan (PKH)

PENDAHULUAN

Kemiskinan dan pengangguran menjadi masalah yang penting saat ini di Indonesia, sehingga menjadi suatu fokus perhatian bagi pemerintah Indonesia. Masalah kemiskinan ini sangatlah kompleks yang dimana saling berkaitan dengan berbagai aspek seperti aspek sosial, ekonomi, budaya, dan aspek lainnya. Kemiskinan terus menjadi masalah fenomenal di belahan dunia, khususnya Indonesia yang merupakan negara berkembang. Kemiskinan telah membuat jutaan anak tidak bisa mengenyam pendidikan, kesulitan membiayai kesehatan, kurangnya tabungan dan investasi, dan masalah lain yang menjurus ke arah tindakan kekerasan dan kejahatan. Kemiskinan yang terjadi dalam suatu negara memang perlu dilihat sebagai suatu masalah yang sangat serius, karena saat ini kemiskinan membuat banyak masyarakat Indonesia

mengalami kesusahan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Persoalan kemiskinan ini lebih dipicu karena masih banyaknya masyarakat yang mengalami pengangguran. Pengangguran yang dialami sebagian masyarakat inilah yang membuat sulitnya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga angka kemiskinan selalu ada.

Masalah kemiskinan yang ada di Indonesia merupakan masalah sosial yang senantiasa relevan untuk dikaji terus menerus. Ini bukan saja karena masalah kemiskinan telah ada sejak lama dan masih hadir di tengah-tengah kita saat ini, tetapi karena kini gejalanya semakin meningkat sejalan dengan krisis yang masih dihadapi bangsa Indonesia. Hal ini juga dikarenakan Indonesia merupakan salah satu negara yang sedang berkembang dengan jumlah penduduk yang terus meningkat, sehingga tingkat kesejahteraan rakyatnya masih jauh

dibawah tingkat kesejahteraan masyarakat negara-negara maju. Kemiskinan seyogyanya digambarkan dengan kondisi seseorang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya seperti sandang, pangan, dan papan. Kurangnya pendapatan mengakibatkan seseorang memiliki kualitas hidup yang rendah. Hal ini disebabkan orang miskin tidak memiliki biaya untuk mengakses berbagai layanan untuk meningkatkan taraf hidupnya. Kemiskinan telah membatasi hak rakyat untuk mendapatkan pendidikan yang layak, mendapatkan pekerjaan yang memadai, mengakses kesehatan yang terjangkau, dan kemiskinan menjadi alasan rendahnya Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia. Kemiskinan merupakan tema sentral dari perjuangan bangsa, sebagai inspirasi dasar dan perjuangan akan kemerdekaan bangsa, serta motivasi fundamental dari cita - cita untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Bekasi menyebutkan bahwa jumlah penduduk miskin di kota Bekasi pada tahun 2011 mencapai 145.929 ribu orang atau 6,12 %, sementara pada tahun 2012 turun menjadi 139.842 ribu orang atau 5,56 %, lalu pada tahun 2013 kembali turun menjadi 137.831 ribu orang atau 5,33 %. Kota Bekasi menurut BPS tahun

2016 di huni sebanyak 2.803.283 jiwa penduduk dan kota Bekasi sebagai kota penyangga Ibukota DKI Jakarta, pintu gerbang utama Jawa Barat dan sebagai pintu masuk dan keluar khususnya ke Jakarta. Tingginya pertumbuhan penduduk di kota Bekasi dipengaruhi oleh urbanisasi. Diantara urban berpotensi menyumbang angka kemiskinan dan permasalahan kesejahteraan sosial lainnya, seperti meningkatnya anak jalanan, anak terlantar, gelandangan, pengemis dan penyandang permasalahan sosial lainnya. Untuk meminimalisir permasalahan kesejahteraan sosial, khususnya kemiskinan yang terus bertambah dari hari ke hari sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, sejak tahun 2007 maka pemerintah Indonesia melalui Kementerian Sosial mengeluarkan Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai salah satu tahapan menuju sistem perlindungan sosial. Program perlindungan sosial yang juga dikenal di dunia internasional dengan istilah Conditional Cash Transfers (CCT) ini terbukti cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan yang dihadapi di negara - negara di dunia, terutama masalah kemiskinan kronis.

PKH dijalankan sebagai pelaksanaan dari UU no. 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial. UU no. 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial.

Perpres no. 15 tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan. Program ini memberikan bantuan uang tunai kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan catatan mengikuti persyaratan yang diwajibkan berdasarkan Basis Data Terpadu. Peserta PKH harus terdaftar dan hadir pada fasilitas kesehatan dan pendidikan terdekat. Kewajiban peserta PKH di bidang kesehatan meliputi pemeriksaan kandungan bagi ibu hamil, pemberian asupan gizi, dan imunisasi serta timbang badan anak balita dan anak prasekolah. Sedangkan kewajiban di bidang pendidikan adalah mendaftarkan dan memastikan kehadiran anggota keluarga PKH ke satuan pendidikan sesuai jenjang sekolah dasar dan menengah. Khusus anggota keluarga peserta PKH penyandang disabilitas, kewajibannya disesuaikan dengan kondisi disabilitasnya. Akses terhadap

kesehatan, pendidikan serta kesejahteraan sosial tersebut diharapkan mampu mengubah perilaku masyarakat agar lebih peduli terhadap kesehatan dan pendidikan generasi penerusnya, sehingga mampu menghilangkan kesenjangan sosial, ketidakberdayaan dan keterasingan sosial yang selama ini melekat pada diri masyarakat.

PKH bukan dimaksudkan sebagai kelanjutan program bantuan sebelumnya seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diberikan dalam rangka membantu rumah tangga miskin untuk mempertahankan daya belinya pada saat pemerintah melakukan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM), tetapi PKH lebih dimaksudkan pada upaya membangun sistem perlindungan sosial kepada masyarakat miskin. PKH merupakan bantuan tunai bersyarat yang sampai saat ini banyak diadopsi oleh banyak negara sebagai strategi program bantuan sosial, karena karakteristik utama program bantuan ini adalah mensyaratkan perilaku yang harus dilakukan oleh penerima bantuan program. Program PKH Kecamatan Bekasi Timur Kelurahan Margahayu telah di mulai dari tahun 2012. Namun pada empat tahun perjalanannya hingga saat ini, yang di canangkan program PKH terakhir ditahun 2016. Program PKH ini tidak terlepas dari berbagai masalah. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan PKH terlihat dari Pertama, yaitu mengenai pemahaman program, banyak masyarakat yang masih memerlukan pemahaman mendalam mengenai PKH. Kedua, yaitu mengenai tepat sasaran, dalam hal pelaksanaan PKH masih perlu lebih akurat dalam menentukan masyarakat tersebut pantas

atau tidaknya menerima bantuan dan terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Ketiga, yaitu permasalahan mengenai tepat waktu, terkait hal ini dalam hal penyaluran dananya masih dibutuhkan ketepatan waktu agar bisa selalu tepat dan cepat ketika dana akan disalurkan kepada para Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

KERANGKA ANALISIS / LANDASAN KONSEPTUAL

Administrasi

Kata administrasi menurut Daryanto (2011 : 1) berasal dari bahasa latin “ad” dan “ministro”. Ad mempunyai arti “kepada” dan ministro berarti “melayani”. Secara bebas dapat diartikan bahwa administrasi merupakan pelayanan dan pengabdian terhadap subjek tertentu.

Pengertian administrasi yang dapat dibedakan menjadi dua bagian yang dikemukakan oleh Irra Chisyanti Dewi (2011 : 3) dalam buku Pengantar Ilmu Administrasi sebagai berikut:

1. Administrasi dalam arti sempit yaitu administrasi berasal dari kata Administratie (bahasa Belanda), yang diartikan sebagai pekerjaan tulis menulis atau ketatausahaan atau kesekretariatan, meliputi kegiatan : menerima, mencatat,

menghimpun, mengolah, mengadakan, mengirim, dan menyimpan.

2. Administrasi dalam arti luas yaitu administrasi merupakan proses kerjasama beberapa individu dengan cara yang efisien dalam mencapai tujuan sebelumnya.

Berdasarkan hal tersebut diatas, administrasi ialah proses penyelenggaraan kerja yang dilakukan bersama – sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Administrasi, baik dalam pengertian luas maupun sempit di dalam penyelenggaraannya diwujudkan melalui fungsi – fungsi manajemen yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan.

Manajemen

Menurut Hasibuan (2011:2) dalam bukunya yang berjudul Manajemen Sumber Daya Manusia mendefinisikan bahwa manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang – orang kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksud

- maksud nyata. (George R. Terry dan Leslie W. Rue, 2011). Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka manajemen dapat dipahami sebagai suatu kiat mengatur, mengelola serta menegendalikan semua sumber daya organisasi baik sumber daya manusia maupun nonmanusia seperti uang, mesin, material, dan lain-lain yang dimiliki organisasi agar organisasi dapat mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

Organisasi

Pengertian organisasi juga dikemukakan oleh beberapa para ahli diantaranya sebagai berikut : Menurut Weber yang dikutip oleh Miftah Thoha dalam bukunya “Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya” (2014:113) bahwa Organisasi

merupakan suatu batasan-batasan tertentu (boundaries), dengan demikian seseorang yang melakukan hubungan interaksi dengan lainnya tidak atas kemauan sendiri. Mereka dibatasi oleh aturan-aturan tertentu. Sedangkan menurut Robbin dan Judge (2008 : 5) organisasi adalah sebuah unit sosial yang dikoordinasikan secara sadar, terdiri atas dua orang atau lebih dan yang relatif terus - menerus guna mencapai satu atau serangkaian tujuan bersama. Kesimpulannya bahwa Organisasi

merupakan suatu proses individu atau kelompok yang melakukan tugas-tugas atau kegiatan yang dijalankan dan memberikan suatu aspirasi dari individu atau kelompok agar organisasi dapat berkembang positif. Dan juga koordinasi antar anggota di dalam suatu organisasi harus baik untuk mencapai tujuan bersama.

Efektivitas

Pada kamus besar Bahasa Indonesia, efektivitas diartikan sebagai sesuatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya) dapat diartikan dapat membawa hasil, berhasil guna serta dapat pula berarti mulai berlaku. Selanjutnya Bahasa Inggris, kata efektif yaitu effective yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan itu berhasil dengan baik. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi. Organisasi biasanya berada dalam lingkungan yang bergejolak dengan sumber data yang terbatas. Lingkungan yang berubah-ubah sesuai dengan perkembangan zaman, perubahan tersebut akan mempengaruhi efektivitas organisasi. Hal tersebut juga sejalan dengan pendapat yang dikemukakan Sedarmayanti dalam bukunya yang berjudul Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja mengenai pengertian

efektivitas yaitu Efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat dicapai. Pengertian efektivitas ini lebih berorientasi kepada keluaran sedangkan masalah penggunaan masukan kurang menjadi perhatian utama. Apabila efisiensi dikaitkan dengan efektivitas maka walaupun terjadi peningkatan efektivitas belum tentu efisiensi meningkat” (Sedarmayanti, 2009: 59). Bahwa sesuatu dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan dengan tepat dan berhasil, maka sesuatu itu sudah berjalan dengan efektif dan efisien, artinya informasi harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ali Muhidin (2009) juga menjelaskan bahwa: Efektivitas juga berhubungan dengan masalah bagaimana pencapaian tujuan atau hasil yang diperoleh, kegunaan atau manfaat dari hasil yang diperoleh, tingkat daya fungsi unsur atau komponen, serta masalah tingkat

kepuasaan pengguna/client.

Bahwa dalam mengukur efektivitas suatu kegiatan atau aktifitas menurut (Sutrisno, 2007 : 125-126) perlu diperhatikan beberapa indikator, yaitu

1. Pemahaman program.
2. Tepat Sasaran.
3. Tepat waktu. (Sutrisno, 2007 : 125-126)

Program Keluarga Harapan

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial (Conditionality Social Transfer) tunai bersyarat kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang ditetapkan sebagai peserta PKH. Sebagai imbalannya KPM diwajibkan memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), yaitu pendidikan dan kesehatan. Tujuan dari PKH adalah untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama pada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Secara khusus tujuan PKH terdiri atas :

1. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi peserta PKH
2. Meningkatkan taraf pendidikan peserta PKH
3. Meningkatkan taraf kesehatan ibu hamil/menyusui dan anak dibawah usia 6 tahun peserta
4. Meningkatkan kondisi ekonomi peserta PKH (Pedoman Pelaksanaan PKH Direktorat Jaminan Sosial Keluarga 2016 : 14)

Kriteria Peserta PKH

Adalah keluarga miskin yang memenuhi minimal salah satu syarat :

1. Memiliki komponen kesehatan yakni anak dengan usia dibawah 6 tahun, ibu hamil/menyusui, termasuk anak penyandang disabilitas ringan/sedang.
2. Memiliki komponen pendidikan anak usia sekolah 6 hingga 21 tahun untuk peserta pendidikan SD/MI sederajat, SMP/MTs sederajat dan/atau SMA/MA sederajat, termasuk penyandang disabilitas ringan/sedang. (Pedoman Pelaksanaan PKH Direktorat Jaminan Sosial Keluarga 2016 : 15)

Dasar Hukum Program Keluarga Harapan

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. (Pedoman Pelaksanaan PKH Direktorat Jaminan Sosial Keluarga 2016 : 12)

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif analisis dengan

pendekatan kualitatif. Menurut Moleong (2013 : 6) Metode kualitatif adalah metode penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi , tindakan, dan lain-lain. secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dahn dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Dengan demikian mendeskripsikan penelitian kualitatif sebagai penelitian dengan menggunakan metode ilmiah untuk mengungkapkan suatu fenomena dengan cara mendeskripsikan data dan fakta melalui kata-kata secara menyeluruh terhadap subjek penelitian. Mulyana (2008: 151). Penulis menggunakan metode penelitian yang menggunakan rancangan atau desain penelitian deskriptif kualitatif untuk mengukur Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Bekasi Timur Kelurahan Margahayu Tahun 2016.

Pemilihan Informan

Teknik penentuan informan yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling, Menurut Sugiyono (2013 : 218-219) Purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan

tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau situasi sosial yang diteliti. Dimana penentuan informan dipilih dengan pertimbangan khusus dari penulis, dengan mempertimbangkan karakteristik data berdasarkan kebutuhan analisa dalam penelitian ini.

Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Dalam proses pengumpulan data sehubungan dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, penulis akan menggunakan beberapa teknik instrumen penelitian dengan melalui kegiatan :

1. Studi Lapangan Studi lapangan yaitu pengumpulan data secara langsung ke lapangan dengan mempergunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi Observasi atau pengamatan langsung merupakan salah satu teknik pengumpulan data dimana peneliti terjun langsung ke lapangan sebagai partisipan atau nonpartisipan. Dengan teknik observasi, peneliti dapat memperoleh gambaran langsung

dan mengetahui keadaan yang sesungguhnya yang terjadi dilapangan.

b. Indepth Interview/ Wawancara mendalam dengan Informan Wawancara dilakukan untuk memperoleh data dari masyarakat langsung melalui komunikasi dua arah. Agar dapat mendapatkan jawaban yang sesungguhnya dari informan, peneliti harus melakukan pendekatan terlebih dahulu kepada informan sehingga informan dapat merasa nyaman dan dapat menjawab pertanyaan yang diajukan secara terbuka dan jujur.

Teknik Analisa Data

Dalam penelitian ini teknik analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung. Dalam menganalisis data peneliti menggunakan model Miles dan Huberman sebagaimana dikutip oleh Sugiyono (2010) yang mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif yang berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah terpenuhi. Proses datanya mencakup:

1. Data Reduction (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang

penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang sudah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya jika diperlukan.

2. Data Display (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data (menyajikan data), penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplay data (menyajikan data), maka akan mudah untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami.

3. Conclusion Drawing/verification (Penarikan Kesimpulan)

Langkah ketiga dalam menganalisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

PEMBAHASAN

Aspek Pemahaman Program
Dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui sejauh mana masyarakat yang sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dapat mempunyai pemahaman yang mendalam tentang Program Keluarga Harapan (PKH) sehingga bisa di aplikasikan dengan baik dan juga mengetahui cara-cara bagaimana pendamping PKH memberikan pemahaman program yang tepat mengenai PKH kepada KPM. Melalui program maka segala bentuk rencana akan lebih mudah terorganisir dan lebih mudah untuk di terapkan. Dengan memperhatikan kelompok sasaran maka suatu program dapat dikatakan efektif atau tidak. Dalam wawancara dengan Key Informan yang ditujukan kepada :

1.1 Drs. H. Jaini, M.MPd selaku Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kota Bekasi, dengan yang ditanyakan adalah bagaimana cara membuat kebijakan PKH di Kota Bekasi agar bisa dipahami dengan baik oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) ?

a. Menjelaskan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) ini adalah kebijakan pemerintah Kementerian Sosial secara pusat yang dilaksanakan di pemerintah

daerah dalam hal ini keterlibatan Dinas Sosial Kota Bekasi bermitra dengan Pelaksana Program Keluarga Harapan Kota Bekasi ketika penjelasan pemahaman PKH kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di masing-masing kelurahan. Dalam tahap awal mengenai Program Keluarga Harapan (PKH) dilakukan sosialisasi ke daerah-daerah di Bekasi yang memang mendapatkan PKH. Di situ akan dijelaskan mengenai bantuan uang secara langsung dengan syarat menjalankan komitmen di bidang pendidikan dan kesehatan yang harus dilakukan oleh masyarakat yang terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Dalam wawancara dengan Informan yang ditunjukkan kepada :

1.2 Usep Satriana, SE, AAAIK selaku Koordinator Pelaksana Program Keluarga Harapan Kota Bekasi, yang ditanyakan adalah bagaimana pemahaman yang dimiliki oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sejauh ini dalam menjalankan PKH sesuai dengan syarat yang telah ditentukan ?

a. Menjelaskan bahwa para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebelum

menerima bantuan harus benar – benar paham apa yang dijelaskan oleh para pendamping PKH mengenai nominal bantuan secara tunai berdasarkan klasifikasi komponen seperti ibu hamil, balita, SD, SMP, dan SMA dan juga harus menjalankan kewajiban komitmennya di bidang pendidikan dan kesehatan harus bagaimana karena apabila para KPM tidak menjalankan komitmennya dengan baik maka akan ada sanksi terkait pemotongan bantuan. Intinya para KPM harus paham betul mengenai PKH.

1.3 Emi Triyana selaku Keluarga Penerima Manfaat (KPM), yang ditanyakan adalah bagaimana sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mengetahui tugas dan kewajiban dalam menjalankan PKH sesuai dengan syarat yang telah ditentukan ?

a. Menjelaskan bahwa sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) harus bisa memahami PKH dengan baik, pada tahap awal sosialisasi mengenai PKH dijelaskan dengan detil oleh pendamping seperti pemberian bantuan langsung uang dengan syarat juga harus melaksanakan

kewajiban serta komitmennya di bidang pendidikan dan kesehatan. Dari beberapa KPM ada yang ditunjuk oleh pendamping untuk menjadi ketua kelompok. Peran ketua kelompok di sini yaitu untuk memudahkan pekerjaan pendamping dalam memandu para KPM yang masih belum paham dengan PKH.

Aspek Tepat Sasaran

Dalam aspek ini peneliti mencoba mengetahui sejauh mana suatu program berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai. Dengan demikian, aspek ini mencoba untuk mengukur bagaimana kesesuaian Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap kelompok sasaran yaitu Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Dalam hal ini tepat sasaran adalah bagaimana masyarakat yang memang kurang mampu bisa semua mendapatkan PKH tanpa terkecuali. Dalam wawancara dengan Key Informan yang ditujukan kepada :

2.1 Drs. H. Jaini, M.MPd selaku Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kota Bekasi, yang ditanyakan adalah bagaimana membuat PKH di Kota Bekasi agar bisa tepat sasaran sehingga masyarakat yang berhak mendapatkan PKH bisa termasuk ke

dalam Keluarga Penerima Manfaat (KPM) ?

Menjelaskan bahwa dalam menentukan awal validasi data mengenai masyarakat yang menerima PKH adalah bagian terpenting untuk menentukan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) agar tepat sasaran. Dalam hal ini pihak Dinas Sosial Kota Bekasi tidak mempunyai wewenang dalam menentukan data seseorang untuk menjadi sebagai KPM. Karena data tersebut diperoleh dari Basis Data Terpadu (BDT) lalu kepada Kementerian Sosial dan diberikan ke Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Sosial Kota Bekasi. Data yang digunakan dalam menentukan seseorang tersebut pantas mendapatkan PKH sudah akurat dan valid agar tepat sasaran memilih masyarakat yang kurang mampu untuk menjadi Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Tetapi pihak Dinas Sosial Kota Bekasi akan kembali melakukan validasi ulang di tahun 2017 dan akan dilibatkan dalam hal validasi data KPM agar masyarakat yang belum mendapatkan PKH bisa segera terdaftar sebagai KPM dan yang sudah tidak layak bisa

mengundurkan diri dari PKH sehingga bisa tepat sasaran masyarakat mana yang berhak menerima PKH.

Dalam wawancara dengan Informan yang ditujukan kepada :

2.2 Usep Satriana, SE, AAAIK selaku Koordinator Pelaksana Program Keluarga Harapan Kota Bekasi, yang ditanyakan adalah bagaimana cara PKH Kota Bekasi membuat program ini bisa tepat sasaran kepada masyarakat yang memang benar – benar pantas menjadi peserta PKH ?

- a. Menjelaskan bahwa data yang ada dalam menentukan seseorang tersebut pantas mendapatkan PKH sudah cukup membantu dalam menentukan orang tersebut pantas sebagai peserta PKH. Tetapi tidak dipungkiri bahwa masih ada proses validasi data yang perlu dimutahirkan kembali. Masih ada masyarakat yang tidak terdaftar menjadi peserta PKH padahal mereka pantas mendapatkan bantuan begitupun sebaliknya yang sudah mampu tetapi masih mendapatkan PKH. Maka dari itu koordinator mensiasati kekurangan tersebut dengan menginstruksikan verifikasi dengan cara lain yaitu

pendamping PKH agar mau mendatangi langsung ke rumah – rumah KPM untuk mengecek kondisi rumahnya apakah mengontrak atau tidak, pekerjaan suaminya seperti apa dan jumlah anaknya apakah sesuai komponen seperti balita, SD, SMP dan SMA, dan ternyata hal tersebut sangat efektif untuk menentukan KPM tersebut tepat sasaran. Maka selaku koordinator akan memerintahkan kepada pendamping jika menemukan ada yang sudah tidak layak menjadi anggota PKH agar segera di data dan di putus bantuannya. Oleh karena itu update data memang harus dilakukan secara intensif dengan jarak waktu yang dekat, sehingga program PKH dapat tepat sasaran.

2.3 Emi Triyana selaku Keluarga Penerima Manfaat (KPM), yang ditanyakan adalah bagaimana sebagai KPM melihat PKH ini telah tepat sasaran dalam hal mengentaskan kemiskinan dan dalam menentukan masyarakat yang tepat untuk menerima PKH ?

- a. Menjelaskan bahwa sebagian masyarakat yang tercatat sebagai Keluarga Penerima Manfaat

(KPM) memang benar - benar pantas secara kemampuan ekonomi yang masih kekurangan dan memang memenuhi komponen dalam PKH. Ketika itu memang ada KPM yang ketika pendataan awal validasi dia masih belum mampu tetapi seiring berjalannya waktu KPM tersebut sudah mapan memiliki pekerjaan tetap sehingga sebagai ketua kelompok melaporkan kepada pendamping bahwa supaya bantuannya di stop di tahap selanjutnya karena sudah tidak memenuhi kriteria. Hal ini agar membuat PKH menjadi tepat sasaran kepada yang berhak menerima.

Aspek Tepat Waktu

Dalam aspek tepat waktu ingin mengetahui penggunaan waktu dalam pelaksanaan pemberian dan penyaluran dana kepada KPM, apakah sudah sesuai dengan jadwal yang dirancang atau tidak. Dengan waktu yang tepat maka program tersebut akan lebih efektif. Dalam wawancara dengan Key Informan yang ditujukan kepada :

- 3.1 Drs. H. Jaini, M.MPd Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kota Bekasi, yang ditanyakan adalah bagaimana sebagai

Keluarga Penerima Manfaat (KPM) merasakan dalam pemberian dana PKH bisa selalu tepat waktu sesuai dengan waktu yang telah ditentukan ?

- a. Menjelaskan bahwa sistem pencairan dana PKH dilakukan di kantor pos dengan mobilisasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Pemberian dana berdasarkan klasifikasi komponen yang diterima oleh KPM seperti untuk bumil, balita, SD, SMP dan SMA. Pemberian dana di berikan oleh Kementerian Sosial lalu diberikan ke kantor pos dan langsung di salurkan ke Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Ketika dana diberikan dari kementerian pusat kepada kantor pos untuk waktunya sudah baik tetapi terkadang terlambat dari waktu yang ditentukan, tetapi ketika dana telah terkumpul semua di kantor pos dan telah ditentukan waktu pencairan dananya kepada KPM maka akan langsung disalurkan sehingga tidak ada pengendapan dana di kantor pos. Dampaknya pencairan dana akan mundur juga kepada KPM dan ini akan merugikan para KPM. Ketika pencairan dana di kantor pos pihak dinas sosial tidak ada

yang turun langsung ke sana, karena pihak dinas sosial hanya mengawasi dan menerima laporan dari pendamping dan PKH Kota Bekasi.

Dalam wawancara dengan Informan yang ditunjukkan kepada :

3.2 Usep Satriana, SE, AAAIK selaku Koordinator Pelaksana Program Keluarga Harapan Kota Bekasi, yang ditanyakan adalah apakah selama ini dalam pemberian dana PKH di kantor pos sistemnya sudah baik dan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan?

- a. Menjelaskan bahwa ketika pemberian dana di kantor pos sistemnya sudah baik dan terstruktur. Dan terkait tepat waktunya dalam pencairan dana kepada KPM memang sudah tepat waktu tetapi terkadang memang dalam empat tahap pencairan dana dalam setahun ada satu tahap yang memang bisa telat dari waktu yang ditentukan dan itu masih kategori wajar. Lalu jika dana tersebut telah sampai di kantor pos maka langsung dibuatkan jadwal pencairan untuk suatu kelurahan yang mana pelaksanaannya bisa dalam 1 - 2 hari dikarenakan dalam 1 kelurahan jumlah KPM yang

sangat banyak. Dalam pencairan dana di kantor pos para KPM juga di dampingi oleh para pendamping PKH supaya dana yang diambil diterima sepenuhnya oleh KPM. Jadi proses administrasi yang mungkin belum dipenuhi bisa dilengkapi dan diatasi oleh pendamping.

3.3 Emi Triyana selaku Keluarga Penerima Manfaat (KPM), yang ditanyakan adalah bagaimana sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) merasakan dalam pemberian dana PKH bisa selalu tepat waktu sesuai dengan waktu yang telah ditentukan ?

- a. Menjelaskan bahwa dalam pemberian dana di kantor pos sudah baik dan tepat waktu walaupun terkadang dalam setahun ada 1 tahap pencairan yang suka mundur dari waktu yang ditentukan. Tetapi memang tidak terlalu sering telat pencairan dananya, kami sebagai KPM tetap sabar dan menunggu proses pencairannya. Pemberian di kantor pos kurang terlalu efektif dikarenakan dalam proses pencairan dana pihak kantor pos melalui pendamping akan

mengumpulkan KPM dalam jumlah banyak sehingga akan terjadi penumpukan KPM di kantor pos dan bisa menyebabkan antrian panjang, untuk pencairan dananya pun tidak bisa diwakilkan oleh orang lain dan waktu pencairan pun tidak fleksibel harus pada waktu yang ditentukan.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Bekasi Timur Kelurahan Margahayu Tahun 2016 dinyatakan sudah efektif. Hal ini didasarkan pada rumusan simpulan sebagai berikut :

Aspek Pemahaman Program

Dalam menentukan Efektifitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Bekasi Timur Kelurahan Margahayu Tahun 2016 ditinjau dari aspek pemahaman program dinyatakan efektif. Hal ini didasarkan bahwa tahap terpenting dalam menjalankan suatu program supaya berjalan dengan baik adalah objek yang dituju harus mengetahui apa – apa saja syarat yang mesti dilakukan selama menjalani PKH. Upaya yang dilakukan

melalui peran para pendamping yang mana akan sangat menonjol dalam membuat para KPM bisa paham dengan PKH. Pendamping PKH di sini selain melakukan pertemuan kelompok di awal dalam bentuk sosialisasi program, pendamping pun harus tetap datang ke rumah – rumah KPM yang masih membutuhkan penjelasan mengenai PKH seperti jumlah nominal bantuan yang akan diterima sesuai klasifikasi komponen seperti ibu hamil, balita, SD, SMP, dan SMA. Dan agar para KPM mampu menjalankan kewajiban serta komitmennya di bidang pendidikan dan kesehatan. Karena akan ada sanksi pemotongan bantuan sebesar 10% jika KPM tidak menyuruh anaknya masuk sekolah dengan benar dan yang absensinya kurang dari 85% serta tidak datang ke fasilitas kesehatan. Pendamping pun menunjuk salah satu dari KPM untuk menjadi ketua kelompok di karenakan untuk membantu tugas pendamping dalam menjelaskan dan memandu kepada KPM agar bisa paham dengan baik mengenai PKH. Dan dengan cara ini para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pun merasa terbantu dengan adanya para pendamping dan ketua kelompok yang bisa dengan sabar mendampingi mereka selama menjalani tugas dan kewajibannya dalam pelaksanaan PKH sehingga bisa

dengan cepat memahami Program Keluarga Harapan (PKH).

Aspek Tepat Sasaran

Dalam menentukan Efektifitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Bekasi Timur Kelurahan Margahayu Tahun 2016 ditinjau dari aspek tepat sasaran dinyatakan efektif. Hal ini didasarkan pada verifikasi dan validasi data memegang peranan penting agar bisa tepat sasaran. Karena Pelaksana Program Keluarga Harapan Kota Bekasi telah mendapatkan data dari Badan Data Terpadu (BDT) lalu kepada Kementerian Sosial dan diberikan ke Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Sosial Kota Bekasi memang akurat dan valid dalam menentukan seseorang pantas atau tidaknya mendapatkan PKH. Tetapi sedikit kendalanya hanya data yang digunakan adalah data lama yang belum terupdate dan harus di mutakhirkan kembali sehingga masih ada masyarakat yang sebenarnya harus mendapatkan PKH malah tidak dapat begitupun sebaliknya yang seharusnya tidak dapat malah masih mendapatkan bantuan PKH. Maka dari itu koordinator PKH Kota Bekasi mensiasati kekurangan tersebut dengan menginstruksikan verifikasi dengan cara lain yaitu pendamping PKH agar mau mendatangi langsung ke rumah

- rumah KPM untuk mengecek kondisi rumahnya apakah mengontrak atau tidak, pekerjaan suaminya seperti apa dan jumlah anaknya apakah sesuai komponen seperti balita, SD, SMP dan SMA, dan ternyata hal tersebut sangat efektif untuk menentukan KPM tersebut tepat sasaran. Menurut Pendamping PKH memang sudah menjalankan perintah untuk turun langsung ke lapangan dalam tahap awal validasi menentukan orang tersebut sebagai KPM. Karena agar supaya datanya menjadi akurat dan tepat sasaran. Dan menurut Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mengakui bahwa cara untuk mengecek langsung ke lapangan adalah yang paling efektif yang semestinya dilakukan oleh pendamping dalam menentukan KPM supaya yang menerima PKH adalah tepat sasaran.

Aspek Tepat Waktu

Dalam menentukan Efektifitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Bekasi Timur Kelurahan Margahayu Tahun 2016 ditinjau dari aspek tepat waktu dinyatakan efektif. Hal ini didasarkan pada proses penyaluran dananya sudah baik dan terstruktur serta tepat waktu kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) walaupun terkadang memang dalam empat tahap pencairan dana dalam setahun ada satu tahap yang memang bisa

telat dari waktu yang ditentukan dan itu masih kategori wajar. Ketika dana sudah disalurkan oleh kementerian sosial kepada pihak kantor pos maka akan segera disalurkan kepada KPM dan ditentukan jadwal pencairan dananya bisa 1 - 2 hari di masing - masing kelurahan agar tidak ada pengendapan dana di kantor pos. Lalu para pendamping membentuk pertemuan kelompok KPM untuk memberitahu tanggal sekian dana akan dicairkan di kantor pos dan pemberian dana bantuan berdasarkan klasifikasi komponen seperti untuk bumil, balita, SD, SMP, dan SMA. Dalam pencairan dana di kantor pos para KPM juga di dampingi oleh para pendamping PKH supaya dana yang diambil diterima sepenuhnya oleh KPM. Jadi proses administrasi yang mungkin belum dipenuhi bisa dilengkapi dan diatasi oleh pendamping. Namun terkadang ada kendala terkait tempat pencairan dananya di kantor pos sehingga akan ada antrian panjang yang dilakukan oleh KPM dan ini sedikit membuat mereka tidak nyaman karena akan membawa ikut anak-anak mereka ke kantor pos ketika pengambilan dananya.

SARAN

Aspek Pemahaman Program

Bagi aspek pemahaman program berdasarkan pemikiran dan hasil penelitian sarannya adalah penjelasan mengenai PKH sebaiknya tidak hanya dilakukan diawal sosialisasi saja tetapi ketika sudah pelaksanaannya pun para pendamping harus tetap bisa selamanya bisa menjelaskan mengenai PKH dengan cara mendatangi ke rumah - rumah para KPM yang masih membutuhkan pemahaman mendalam tentang PKH. Sebaiknya PKH Kota Bekasi pun menyediakan buku panduan mengenai apa saja yang harus dilakukan KPM dibidang pendidikan dan kesehatan agar dalam menjalankan program bisa benar - benar maksimal.

Aspek Tepat Sasaran

Bagi aspek tepat sasaran berdasarkan pemikiran dan hasil penelitian sarannya adalah dalam menentukan masyarakat tersebut sesuai kriteria peserta PKH supaya tepat sasaran tidak hanya mengandalkan data dari Kementerian Sosial melalui Basis Data Terpadu (BDT). Data tersebut memang akurat dan valid tetapi dikhawatirkan menggunakan data lama dan belum dimutakhirkan kembali, sehingga yang harus dilakukan adalah ketika tahap awal validasi dan verifikasi menentukan para peserta PKH maka para pendamping harus melakukan pendekatan ke rumah -

rumah masyarakat untuk mendata dan mengecek langsung kondisi rumahnya bagaimana, menanyakan jenis pekerjaannya apa, dan apakah ada komponen yang memenuhi syarat agar orang yg berhak mendapatkan PKH bisa tepat sasaran.

Aspek Tepat Waktu

Bagi aspek tepat waktu berdasarkan pemikiran dan hasil penelitian sarannya adalah dalam sistem penyaluran dananya kepada KPM. Untuk terkait tepat waktunya sudah baik dan terencana ketika pihak kantor pos sudah terkumpul dananya dari Kementerian Sosial maka langsung di salurkan dan memberikannya kepada KPM. Tetapi yang seharusnya lebih baik itu adalah sistem penyaluran dananya tidak secara tunai dan tidak di kantor pos tetapi di kebijakan yang baru untuk tahun 2017 bisa di terapkan melalui sistem transfer dari bank lalu para KPM bisa mengambilnya di Anjungan Tunai Mandiri (ATM) terdekat dan dalam waktu kapan saja tidak terpaksa oleh waktu sehingga akan lebih praktis tidak harus mengantri lama di kantor pos.

DAFTAR PUSTAKA

- Daryanto, (2011), Administrasi Pendidikan. Jakarta : Rineka Cipta
- Dewi, Irra Chrisyanti. (2011), Pengantar Ilmu Administrasi. Jakarta : PT Prestasi Pustakarya
- Hasibuan, Malayu, (2011), Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta : PT. Bumi Aksar
- Kementerian Sosial, (2016), Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH), Jakarta : Direktorat Jaminan Sosial Keluarga
- Muhidin, Sambas Ali. (2009). Konsep Efektivitas Pembelajaran. [Online]. Tersedia: <http://sambasalim.com/pendidikan/konsep-efektivitas-pembelajaran.html> [12 September 2010]
- Mulyana, Deddy.(2008), Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya,
- Moloeng, Lexy J. (2013), Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, .
- Pelaksana PKH Kota Bekasi, (2017), Buku Profil PKH Kota Bekasi, Bekasi
- Rivai, Veithal dan Sagala, Ella Januari, (2009), Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan (Edisi Kedua), Jakarta : Raja Grafindo
- Robbin P. Stephen dan Judge A. Timothy, (2008), Perilaku Organisasi, Jakarta : Salemba Empat
- Sedarmayanti, (2009), Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja, Jakarta : Mandar Maju
- Sudarmanto, (2009), Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM Teori, Dimensi dan Implementasi Dalam Organisasi. Yogyakarta : PUSTAKA PELAJAR

- Sugiyono, (2010), Memahami Penelitian Kualitatif, Bandung : Alfabeta
- Sugiyono, (2013), Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Bandung : Alfabeta
- Sutrisno, Edy. 2007. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Kencana.
- Thoha, Miftah, (2014), Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya. Jakarta : Rajawali Press
- Terry, George dan Leslie W. Rue, (2011), Dasar-dasar Manajemen, Cetakan Keduabelas. Jakarta : PT. Bumi Aksara

Dokumen

Undang-Undang No.11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Sumber Elektronik

<https://bekasikota.bps.go.id/linkTabelStatistik/view/id/33>

<https://bekasikota.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/9>